



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PURWIYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
3. NHK : **139737**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.959.308.000**

1. Tanah Seluas 2300 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/70 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 837.692.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/70 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 667.088.000
4. Tanah Seluas 367 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/150 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 794.528.000
6. Tanah Seluas 4000 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
7. Tanah Seluas 6000 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.458.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA JEEP / CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP / CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



520.000.000

4. MOBIL, HONDA JEEP / HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

320.000.000

5. MOBIL, LEXUS RXT 270 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

420.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **57.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **3.250.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. **7.724.308.000****III. HUTANG** Rp. **100.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **7.624.308.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.